



‘Topeng Malioboro’ segera dibuka

TERGUSUR IKLAN—Salah satu bangunan cagar budaya di Jalan Malioboro yang tertutupi iklan. Puluhan bangunan warisan budaya di kawasan paling banyak dikunjungi wisatawan itu hanya tinggal beberapa yang masih mempertahankan bentuk asli. Foto diambil Selasa (14/6) lalu.

Anggraeny Prajayanti
HARIAN JOGJA

JOGJA—Baliho iklan dan papan nama toko yang sekarang menutupi bangunan di Malioboro akan segera ditertibkan. Walikota Jogja segera mengeluarkan Perwal yang mengatur ukuran iklan usaha untuk kawasan Malioboro.

Ditemui beberapa waktu lalu, Walikota Jogja, Herry Zudianto mengatakan masalah papan nama dan lain-lain terutama yang ada di Malioboro akan disegera dibereskan. “Pokoknya setelah Perda Pajak Daerah disahkan, masalah pa-

• **Topeng Malioboro...**

Masalah baliho dan papan nama toko tersebut nantinya akan diatur melalui Perwal. Dia menargetkan, sebelum Ramadan akhir Juli mendatang, perwal tersebut sudah bisa dijalankan.

Dalam perwal akan diatur mengenai pembatasan ukuran baliho iklan dan papan nama toko yang diperbolehkan. Pembatasan ukuran tersebut akan dilakukan dengan memperhitungkan persentase *facade* bangunan.

Misalnya *facade* atau tampak muka bangunan tersebut berukuran 10 meter persegi, iklan atau papan nama yang diperbolehkan dipasang hanya sekian persen dari total luasan *facade*.

Dalam perwal juga akan diatur pajak reklame. Baliho iklan dan papan nama yang besarnya di bawah ukuran maksimal yang diperbolehkan, akan dibebaskan dari pajak.

Namun jika sesuai besaran yang diperbolehkan baru akan ditarik pajak.

Pekan lalu, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jogja, akademisi, LSM dan pemilik usaha di Malioboro, didapati bangunan asli warisan budaya di Malioboro hanya tersisa 10 buah yang *facade*-nya masih asli. Dari sekitar 60 bangunan warisan budaya, sebagian besar sudah direnovasi dan sebagian lain tertutup baliho iklan dan papan nama toko berukuran raksasa.

Herry mengakui, semua bagian bangunan tertutup iklan dan papan nama bisa mengurangi keindahan bangunan kuno di Malioboro.

Koordinator Masyarakat Advokasi Budaya (MADYA) Jhohannes Marbun mengatakan, sebagai pemerhati budaya, dia menghargai rencana Pemkot Jogja. Namun dia me-

Herry Zudianto
Walikota Jogja

Pokoknya setelah Perda Pajak Daerah disahkan, masalah papan iklan dan baliho ini akan dibereskan,” ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
4. Dinas Ketertiban			
5. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005